

Peran Elit Politik Dalam Pembangunan Industrialisasi Dan Modernisasi: Studi Komparasi Di Era Orde Lama Dan Reformasi

*The Role of Political Elite in The Development of Industrialization and
Modernization: A Comparative Study in The Old Order and Reform Era*

Muhamad Fajri Ridwan¹, Nita Aribah Hani²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pamulang, Banten, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Vol. 1, No. 01
Hal : 112-118
Diterbitkan : 01 Juli 2025

Abstrak

Tujuan penelitian ini menganalisis peran elit politik dalam pembangunan ekonomi Indonesia selama era Orde Lama dan Reformasi, menggunakan pendekatan historis-komparatif untuk menganalisis bagaimana pengaruh, jaringan, dan kepentingan elit politik membentuk kebijakan ekonomi dan alokasi sumber daya, serta dampaknya terhadap industrialisasi dan modernisasi. Studi ini membandingkan karakteristik elit politik, struktur kekuasaan, dan mekanisme pengambilan keputusan di kedua era tersebut. Analisis historis mendalam mengungkap bagaimana perilaku elit politik, baik yang pro-pertumbuhan maupun yang rentan korupsi dan nepotisme, memengaruhi kebijakan ekonomi makro dan mikro. Perbandingan ini menunjukkan bagaimana perbedaan dalam struktur politik dan perilaku elit politik menghasilkan pola industrialisasi dan modernisasi yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua era memiliki tujuan pembangunan ekonomi, perbedaan dalam struktur kekuasaan dan perilaku elit politik menghasilkan outcome yang signifikan dalam hal pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan kualitas pembangunan secara keseluruhan. Studi ini memberikan kontribusi penting dalam memahami kompleksitas hubungan antara politik dan ekonomi dalam konteks pembangunan Indonesia, khususnya peran krusial elit politik dalam membentuk arah dan hasil pembangunan.

Kata Kunci : Pembangunan Politik, Elit Politik, Industrialisasi, Modernisasi

KORESPONDENSI

No Handphone : 083870115668
E-mail : mfajrirdwan88@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze the role of political elites in Indonesia's economic development during the Old Order and Reformation eras, using a historical-comparative approach to analyze how the influence, networks, and interests of political elites shaped economic policies and resource allocation, and their impact on industrialization and modernization. This study compares the characteristics of political elites, power structures, and decision-making mechanisms in both eras. In-depth historical analysis reveals how the behavior of political elites, both pro-growth and those prone to corruption and nepotism, influenced macro and micro economic policies. This comparison shows how differences in political structures and behavior of political elites resulted in different patterns of industrialization and modernization. The results show that although both eras had economic development goals, differences in power structures and behavior of political elites resulted in significant outcomes in terms of sustainable economic growth, equitable development, and overall development quality. This study makes an important contribution to understanding the complexity of the relationship between politics and economics in the context of Indonesian development, especially the crucial role of political elites in shaping the direction and outcomes of development.

Keywords: Political Development, Political Elites, Industrialization, Modernization

Latar Belakang

Indonesia sejak kemerdekaan telah menempuh perjalanan panjang dalam upaya membangun ekonomi dan memodernisasi masyarakatnya. Proses ini tak lepas dari peran penting pembangunan politik dan, khususnya, perilaku serta pengaruh elit politik. Jurnal ini berfokus pada peran elit politik dalam pembangunan ekonomi Indonesia, membandingkan dua era yang sangat berbeda: Orde Lama (1945-1965) dan era Reformasi (1998-sekarang). Kedua era ini menawarkan kontras yang menarik dalam hal struktur politik, stabilitas pemerintahan, dan perilaku elit politik, yang semuanya berdampak signifikan terhadap industrialisasi dan modernisasi.

Era Orde Lama, ditandai oleh ketidakstabilan politik yang kronis dan dominasi pengaruh pribadi Presiden Soekarno, menunjukkan karakteristik pembangunan ekonomi yang berorientasi pada ideologi dan nasionalisme yang kuat, seringkali mengorbankan efisiensi ekonomi. Intervensi negara yang besar dan kebijakan ekonomi yang berubah-ubah, yang dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ideologi, menciptakan iklim investasi yang tidak menentu (Riwanti, 2015). Meskipun terdapat upaya industrialisasi, pertumbuhan ekonomi terhambat oleh pergolakan politik dan kebijakan ekonomi yang tidak konsisten.

Era Reformasi, setelah jatuhnya Orde Baru, menandai peralihan menuju sistem politik yang lebih demokratis dan desentralisasi. Meskipun menawarkan potensi untuk pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, era ini juga diwarnai oleh tantangan tersendiri. Perubahan sistem politik yang cepat, dinamika koalisi partai yang fluktuatif, dan potensi munculnya kepentingan politik yang menghambat pembangunan ekonomi menjadi tantangan yang perlu dikaji. Perilaku elit politik dalam era ini pun beragam, termasuk munculnya praktik korupsi dan penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Oleh karena itu, studi komparatif tentang peran elit politik dalam pembangunan ekonomi di era Orde Lama dan Reformasi sangat penting. Perbandingan ini akan mengungkap bagaimana perbedaan dalam struktur politik, stabilitas pemerintahan, dan perilaku elit politik menghasilkan pola industrialisasi dan modernisasi yang berbeda (Chalik, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh, jaringan, dan kepentingan elit politik di kedua era tersebut membentuk kebijakan ekonomi dan alokasi sumber daya, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kualitas pembangunan secara keseluruhan dalam mendukung modernisasi dan industrialisasi. Memahami dinamika ini, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia dan merumuskan strategi pembangunan yang lebih efektif di masa depan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif pendekatan studi kasus untuk menggali secara mendalam peran elit politik dalam pembangunan ekonomi Indonesia selama era Orde Lama dan Reformasi. Analisis historis-komparatif digunakan untuk membandingkan kedua era dan mengidentifikasi pola serta perbedaan yang signifikan (Chalik, 2017).

1) Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder. Meliputi dokumen-dokumen resmi pemerintah (misalnya, laporan pembangunan nasional, kebijakan ekonomi), literatur ilmiah yang relevan (buku, jurnal, artikel). Data sekunder ini akan memberikan gambaran

umum tentang kebijakan ekonomi, struktur politik, dan perkembangan ekonomi di kedua era.

- a. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data diambil menggunakan studi pustaka dari berbagai sumber
- b. Teknik Analisis Data
Analisis data akan dilakukan secara bertahap dengan menggunakan aplikasi Nvivo. Analisis komparatif data dari era Orde Lama dan Reformasi akan dibandingkan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam peran elit politik, struktur politik, dan hasil pembangunan ekonomi.

Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang peran elit politik dalam pembangunan ekonomi Indonesia di era Orde Lama dan Reformasi. Hasil penelitian akan memberikan kontribusi bagi pemahaman sejarah pembangunan ekonomi Indonesia dan dapat digunakan untuk merumuskan strategi pembangunan yang lebih efektif di masa depan.

Hasil dan Pembahasan

Peran elit politik dalam pembangunan ekonomi Indonesia selama era Orde Lama dan Reformasi, dengan fokus pada bagaimana pengaruh, jaringan, dan kepentingan mereka membentuk kebijakan ekonomi dan alokasi sumber daya (Winarno, 2008). Analisis historis-komparatif mengungkapkan perbedaan signifikan dalam struktur politik, stabilitas pemerintahan, dan perilaku elit politik di kedua era, yang berdampak pada pola industrialisasi dan modernisasi.

Era Orde Lama (1945-1965)

Dominasi Presiden Soekarno dan pengaruh kuatnya dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kebijakan ekonomi cenderung berorientasi pada ideologi dan nasionalisme, seringkali mengabaikan efisiensi dan keberlanjutan ekonomi (Armawi, 2020). Proyek-proyek besar seperti pembangunan infrastruktur dan industri berat, meskipun bermaksud untuk mendorong industrialisasi, seringkali mengalami kendala karena manajemen yang buruk dan korupsi. Intervensi negara yang kuat dan perubahan kebijakan yang sering menciptakan ketidakpastian bagi investor, menghambat pertumbuhan sektor swasta. Jaringan patron-klien yang kuat, dimana akses ke sumber daya dan kekuasaan didasarkan pada hubungan personal, memperkuat praktik korupsi dan nepotisme.

Hal ini tercermin dalam alokasi sumber daya yang tidak efisien dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Analisis wawancara (jika dilakukan) akan memberikan perspektif tambahan tentang dinamika ini.

Dominasi personal Presiden Soekarno dan ideologi yang kuat menghambat perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Ketidakstabilan politik dan kebijakan ekonomi yang berubah-ubah menciptakan ketidakpastian dan menghambat investasi. Praktik patron-klien dan korupsi menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien.

Biaya politik dimasa (1958-1965) dari tahun ke tahun cenderung meningkat hingga mencapai angka tertinggi pengeluaran politik terhadap APBN sebesar 39 persen. Sedangkan Penerimaan dan Pengeluaran Ril APBN justru cenderung menurun yang mencapai titik terendahnya di tahun 1965 senilai 1,6 untuk penerimaan dan 4,1 untuk pengeluaran dengan kondisi tersebut defisit APBN sangat besar hingga mencapai -1565,6 miliar rupiah pada tahun

1965 (*Masa Kepemimpinan Soekarno~ Krisis Di Era Ekonomi Terpimpin ~ Indonesia Baik 2024-12-31 14~27~22Z*, n.d.).

Era Soekarno merupakan periode penting dalam sejarah Indonesia, di mana upaya modernisasi dan industrialisasi menjadi fokus utama. Para elit politik pada masa itu memang memiliki pengaruh besar terhadap proses ini. Dalam pembentukan kebijakan elit politik memainkan peran kunci dalam merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk mendorong modernisasi dan industrialisasi. Contohnya, rencana pembangunan nasional (Repelita) yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur, industri, dan sektor ekonomi lainnya.

Pengendalian sumber daya pada kala itu elit politik memiliki kendali atas sumber daya negara, termasuk dana pembangunan, yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek modernisasi dan industrialisasi. Elit politik berupaya mempromosikan ideologi nasional yang mendukung modernisasi dan industrialisasi. Nasionalisme dan sosialisme menjadi ideologi yang diusung, yang menekankan pentingnya pembangunan ekonomi dan kemajuan teknologi.

Pembentukan birokrasi dalam membentuk birokrasi yang mendukung upaya modernisasi dan industrialisasi. Dukungan elit politik dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara yang penting untuk mendukung pertumbuhan industri dan perdagangan. Kemudian, dukungan terhadap industry barat juga elit politik mendorong pengembangan tersebut seperti baja, semen, dan minyak bumi, yang dianggap sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi.

Soekarno sendiri merupakan tokoh sentral dalam mendorong modernisasi dan industrialisasi. Beliau memiliki visi untuk membangun Indonesia menjadi negara maju dan berdikari. Beliau juga berperan besar dalam menarik investasi asing dan membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara lain untuk mendukung pembangunan ekonomi. Para elit politik di era Soekarno memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses modernisasi dan industrialisasi di Indonesia. Mereka berperan dalam merumuskan kebijakan, mengendalikan sumber daya, mempromosikan ideologi, dan membentuk birokrasi yang mendukung upaya pembangunan ekonomi. Meskipun terdapat berbagai tantangan dan kritik, era Soekarno dapat dikatakan sebagai masa awal yang penting dalam upaya Indonesia untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan.

Era Soekarno adalah masa di mana semangat membangun Indonesia menjadi negara modern dan industrialis sangat terasa. Para pemimpin dan elit politik di era itu bukan hanya sekadar merumuskan kebijakan, namun juga menjalankan program-program konkret untuk mewujudkannya (Latif, 2011).

Salah satu contoh kongkretnya adalah pembangunan industri baja di Cilegon. Pada tahun 1960-an, pemerintah Soekarno membangun pabrik baja di Cilegon, yang diberinama Krakatau Steel. Pembangunan pabrik ini merupakan langkah berani untuk mengupayakan kemandirian Indonesia dalam produksi baja, yang sebelumnya sangat bergantung pada impor. Dengan adanya Krakatau Steel, Indonesia diharapkan dapat membangun infrastruktur, seperti jembatan dan gedung bertingkat, dengan bahan baku yang dihasilkan sendiri.

Selain Krakatau Steel, contoh lain adalah pembangunan jaringan jalan raya. Soekarno melihat pentingnya konektivitas untuk mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi. Beliau menginisiasi pembangunan jalan raya Trans-Sumatra, Trans-Jawa, dan Trans-Kalimantan. Proyek-proyek pembangunan jalan ini memudahkan akses antar daerah, mendorong

perdagangan, dan meningkatkan mobilitas penduduk.

Tak hanya infrastruktur, Soekarno juga mendorong pembangunan sektor pendidikan. Beliau menyadari bahwa sumber daya manusia yang terampil adalah kunci kemajuan bangsa. Salah satu contohnya adalah pembangunan Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1959. ITB, sebagai lembaga pendidikan tinggi teknik, diharapkan dapat mencetak para ahli yang mampu membangun dan mengembangkan teknologi di Indonesia.

Contoh-contoh kongkret ini menunjukkan bahwa para elit politik di era Soekarno tidak hanya bermimpi tentang modernisasi dan industrialisasi, namun juga berusaha keras untuk mewujudkannya melalui langkah-langkah nyata. Meskipun terdapat berbagai tantangan dan kritik, upaya mereka menorehkan jejak awal yang penting dalam perjalanan Indonesia menuju kemakmuran dan kemajuan.

Era Reformasi (1998-sekarang)

Era Reformasi ditandai oleh peralihan menuju sistem politik yang lebih demokratis dan desentralisasi (Latif, 2011). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan transparansi dan akuntabilitas, tantangan baru muncul. Dinamika koalisi partai yang fluktuatif dan kepentingan politik yang beragam seringkali menghambat pengambilan keputusan yang efektif dalam bidang ekonomi.

Dinamika koalisi partai yang fluktuatif dan kepentingan politik yang beragam memang seringkali menjadi penghambat pengambilan keputusan yang efektif dalam bidang ekonomi. Bayangkan, seperti sebuah kapal yang hendak berlayar, tapi nakhodanya selalu berganti, kompasnya pun berbeda-beda, dan para awaknya punya tujuan masing-masing. Tentu perjalanan kapal tersebut akan menjadi sangat tidak pasti dan sulit mencapai tujuannya.

Contoh nyata dari dinamika koalisi partai yang fluktuatif dan kepentingan politik yang beragam yang menghambat pengambilan keputusan ekonomi adalah perubahan kebijakan ekonomi yang sering terjadi di Indonesia. Misalnya, kebijakan pengendalian harga yang seringkali berubah-ubah seiring pergantian pemerintahan. Suatu pemerintahan mungkin menekankan pada stabilitas harga, sedangkan pemerintahan berikutnya menekankan pada peningkatan produksi, dan kemudian pemerintahan selanjutnya menekankan pada peningkatan daya beli. Perubahan kebijakan yang terlalu sering dapat membuat investor kebingungan dan mengurangi minat mereka untuk berinvestasi di Indonesia. Contoh lainnya adalah pembangunan infrastruktur yang sering terhambat karena ketidaksepakatan antar partai politik. Misalnya, pembangunan jalan tol yang mengalami penundaan karena ada partai politik yang menentangnya atas dasar kepentingan politik lokal. Ketidaksepakatan ini dapat memperlambat proses pembangunan dan mengakibatkan kerugian ekonomi bagi negara.

Dinamika politik yang fluktuatif seringkali mengakibatkan ketidakpastian dalam dunia usaha. Para pengusaha merasa sulit untuk merencanakan bisnis mereka karena tidak tahu kebijakan apa yang akan dikeluarkan oleh pemerintah di masa depan. Ketidakpastian ini dapat mengurangi minat investasi dan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada konsensus nasional yang kuat tentang arah kebijakan ekonomi Indonesia. Para partai politik harus mampu menyingkirkan kepentingan politik sementara dan mengutamakan kepentingan nasional. Selain itu, perlu ada mekanisme yang jelas untuk mengantisipasi perubahan kebijakan yang tiba-tiba. Dengan cara ini, keputusan ekonomi yang diambil dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi,

praktik korupsi dan nepotisme masih menjadi masalah yang signifikan. Analisis menunjukkan adanya upaya untuk memperbaiki tata kelola ekonomi, namun implementasinya masih menghadapi kendala. Transisi ke demokrasi membawa tantangan baru dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dinamika politik yang kompleks dan kepentingan yang beragam dapat menghambat kebijakan ekonomi yang konsisten. Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, korupsi dan nepotisme masih menjadi masalah yang perlu ditangani.

Era Reformasi di Indonesia, yang dimulai pasca jatuhnya rezim Orde Baru, memang memiliki tujuan untuk mendorong modernisasi dan industrialisasi, namun dengan pendekatan yang berbeda dari era sebelumnya, era Reformasi membawa beberapa perubahan signifikan yang mendukung kemajuan ekonomi dan industrialisasi.

Dukungan Era Reformasi terhadap Modernisasi dan Industrialisasi:

1. Desentralisasi:

Salah satu pilar utama Reformasi adalah desentralisasi, yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, dengan memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan potensi lokal dan menarik investasi.

2. Peningkatan Demokrasi:

Reformasi membawa angin segar bagi demokrasi di Indonesia, dengan kebebasan pers dan partisipasi politik yang lebih terbuka. Hal ini menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

3. Pembukaan Pasar: Era Reformasi membuka pasar Indonesia bagi investasi asing, dengan deregulasi dan liberalisasi ekonomi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi.

Contoh Kongkret:

1. Pertumbuhan Industri Manufaktur: Meskipun sempat terhambat oleh krisis ekonomi 1998, Indonesia mengalami pertumbuhan industri manufaktur yang signifikan pasca Reformasi. Contohnya, industri otomotif mengalami perkembangan pesat, dengan peningkatan produksi dan ekspor mobil.

2. Peningkatan Investasi:

Era Reformasi menarik investasi asing, terutama di sektor infrastruktur. Contohnya, pembangunan jalan tol dan pelabuhan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan memudahkan akses antar daerah.

3. Peningkatan Sektor Pariwisata: Reformasi membawa peningkatan keamanan dan stabilitas politik, yang mendorong pertumbuhan sektor pariwisata.

Contohnya, Bali menjadi destinasi wisata internasional yang populer mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Era Reformasi membawa perubahan signifikan yang mendukung modernisasi dan industrialisasi di Indonesia. Meskipun terdapat tantangan dan hambatan, Reformasi menciptakan landasan yang lebih kuat bagi pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi di masa depan. Perlu ada upaya berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memperkuat fondasi modernisasi dan industrialisasi di Indonesia.

Perbandingan Era Orde Lama dan Reformasi

Perbandingan kedua era menunjukkan bahwa meskipun keduanya memiliki tujuan untuk mendorong industrialisasi dan modernisasi, perbedaan dalam struktur politik dan perilaku elit politik menghasilkan outcome yang berbeda. Orde Lama ditandai oleh dominasi personal dan

kebijakan ekonomi yang tidak konsisten, sedangkan Reformasi ditandai oleh dinamika politik yang kompleks dan tantangan dalam membangun konsensus politik. Kedua era menunjukkan bahwa perilaku elit politik, baik yang pro-pertumbuhan maupun yang rentan korupsi dan nepotisme, mempunyai dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Era Reformasi menunjukkan potensi untuk pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, namun hal ini membutuhkan stabilitas politik dan tata kelola yang baik untuk diwujudkan.

Studi ini menunjukkan bahwa peran elit politik dalam pembangunan ekonomi Indonesia sangat kompleks dan bervariasi antar era. Baik di Orde Lama maupun Reformasi, perilaku dan kepentingan elit politik telah membentuk kebijakan ekonomi dan alokasi sumber daya, dengan dampak signifikan terhadap industrialisasi dan modernisasi. Penelitian ini menyoroti perlunya stabilitas politik, tata kelola yang baik, dan kontrol terhadap korupsi untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Kesimpulan

Di era Orde Lama, elit politik, terutama di bawah kepemimpinan Soekarno, berfokus pada upaya membangun nasionalisme dan kemandirian ekonomi melalui kebijakan industrialisasi yang terpusat. Pembangunan infrastruktur, seperti pabrik baja dan jalan tol, menjadi prioritas utama, meskipun seringkali terhambat oleh tantangan internal dan eksternal. Sementara itu, di era Reformasi, meskipun terjadi desentralisasi dan pembukaan pasar yang lebih luas, dinamika politik yang fluktuatif dan beragamnya kepentingan politik seringkali menjadi penghambat dalam pengambilan keputusan yang efektif. Meski begitu, era ini juga menyaksikan pertumbuhan sektor industri yang lebih beragam dan peningkatan investasi asing, yang didorong oleh kebijakan liberalisasi ekonomi.

Dengan demikian, perbandingan antara kedua era menunjukkan bahwa meskipun tujuan modernisasi dan industrialisasi tetap sama, cara dan efektivitas elit politik dalam mencapainya sangat dipengaruhi oleh konteks politik dan sosial masing-masing periode. Keberhasilan pembangunan industri dan modernisasi di masa depan akan sangat bergantung pada kemampuan elit politik untuk mengatasi tantangan yang ada, menciptakan konsensus yang kuat, serta menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan politik sementara.

Daftar Pustaka

- Armawi, A. (2020). *Nasionalisme dalam dinamika ketahanan nasional*. UGM PRESS.
- Chalik, A. (2017). *Pertarungan elite dalam politik lokal*. Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.
- Masa Kepemimpinan Soekarno~ Krisis di Era Ekonomi Terpimpin ~ Indonesia Baik 2024- 12-31 14~27~22Z*. (n.d.).
- Riwanti, W. (2015). Kajian peran elit politik dalam kebijakan pangan: jebakan impor pangan pasca reformasi. *Natapraja*, 3(1).
- Winarno, B. (2008). *Globalisasi: Peluang atau ancaman bagi Indonesia*. Erlangga.